

RINGKASAN

Prosedur Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember, Dela Puspita, NIM D42220387, Tahun 2026, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Dewi Dwi Oktawati, S.H. (Pembimbing Lapang) dan Berlinia Yudha Pratiwi, S.E., M.S.A., Ak. (Dosen Pembimbing).

Kegiatan magang dilaksanakan pada semester 7 (tujuh) dengan jangka waktu 720 jam atau setara dengan 4 (empat) bulan, terhitung sejak 1 September hingga 31 Desember 2025 dan dikonversikan ke dalam 20 SKS. Seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan menjadi bekal penting yang diterapkan dalam kegiatan magang ini. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan instansi vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPKNL memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Sebagai bagian dari DJKN, KPKNL berfungsi untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, mengelola aset negara secara akuntabel, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus utama magang berada pada Seksi Piutang Negara dengan penekanan pada pemahaman dan praktik prosedur penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung terkait pengurusan piutang negara, mulai dari penelitian administrasi dan lapangan, penyusunan Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK), Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa (BAPSP), Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL), hingga Laporan Hasil Penelitian Lapangan (LHPL) sebagai dasar penetapan PSBDT.

Penetapan PSBDT di KPKNL Jember telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016, yaitu setelah seluruh upaya penagihan dilakukan secara optimal namun piutang tetap tidak dapat ditagih karena ketidakmampuan debitur, ketidaktahuan keberadaan

penanggung hutang, atau ketiadaan barang jaminan yang bernilai ekonomis. Kegiatan penelitian lapangan menjadi tahapan penting untuk memperoleh data faktual sebagai dasar pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, magang ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik pengurusan piutang negara, sekaligus melatih sikap profesional, tanggung jawab, dan kemampuan kerja sama dalam lingkungan kerja instansi pemerintah.